

TAHUN
2025

RENCANA AKSI ATAS KINERJA

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN



SETWAN KAB. PANGANDARAN
setwanpangandaran@gmail.com
dprd.pangandarankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pengukuran Rencana Aksi Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat diselsaikan. Laporan Rencana Aksi merupakan sarana perencanaan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Dengan disusunnya rencana aksi ini diharapkan seluruh pegawai Sekretariat DPRD mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik. Laporan rencana aksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Insyansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan rencana aksi ini. Diharapkan rencana aksi ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dan dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan diharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

Parigi, 31 Januari 2025
Sekretaris DPRD



Drs. HERI GUSTARI, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama, IV/c
NIP. 19680817 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	3
BAB II TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	6
2.3 Program dan Kegiatan	7
BAB III PENGUKURAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA.....	11
3.1 Perjanjian Kinerja	11
3.2 Indikator dan Target Kinerja	11
3.3 Pengukuran Kinerja	18
BAB IV PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT.....	19
4.1 Permasalahan	19
4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	19
BAB V PENUTUP.....	20
LAMPIRAN PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instruksi presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Oleh karena itu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD maka disusun Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 10. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Pangandaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan mengacu pada ketentuan dimaksud, maka tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD

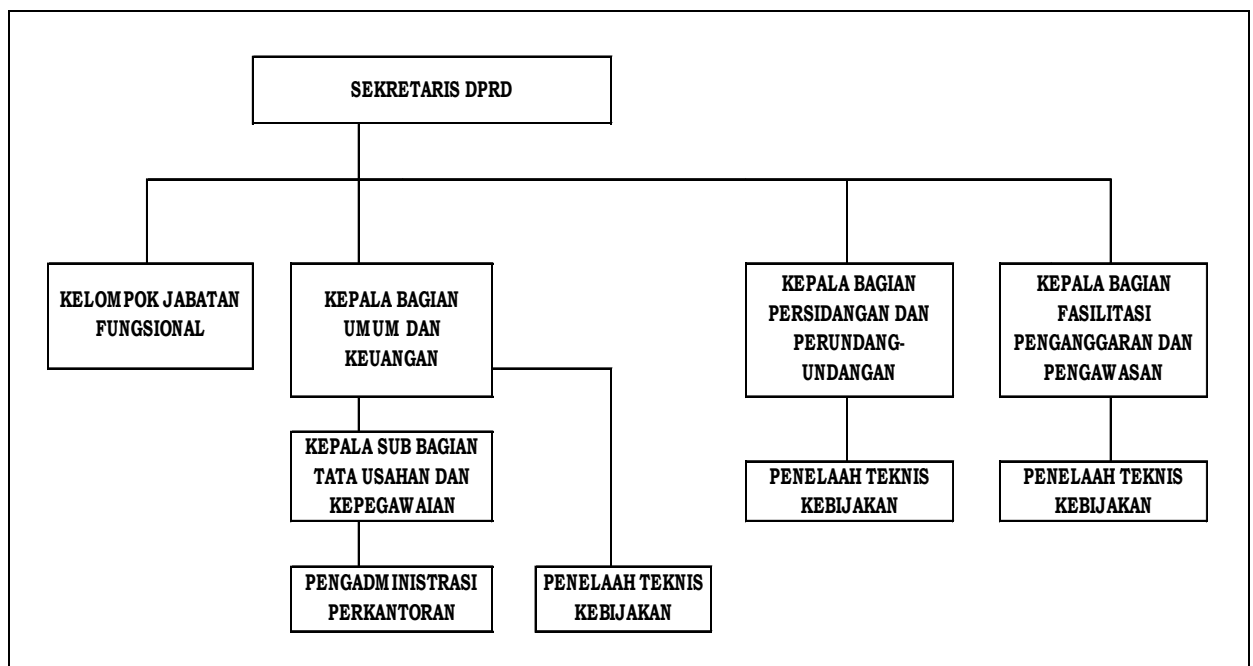
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Fungsi Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berikut merupakan susunan organisasi serta tata kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah:



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran

No	Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris DPRD	1
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	-
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1
4.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	1
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	9
7.	Pengadministrasian Perkantoran	-
8.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
	Jumlah	20

BAB II

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan dalam Misi Kabupaten Pangandaran di bidang pemerintahan yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

Untuk mendukung visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran diatas maka disusunlah Tujuan dari Sekretariat DPRD yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif.” Tujuan tersebut kemudian dijabarkan menjadi Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran Strategis

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	
MISI : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan dapat dilihat sebagai berikut:

Strategi:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
2. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan penguatan akuntabilitas pemerintah akuntabilitas evaluasi kinerja dan atau instansi.
2. Efektifitas pelayanan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD akan melaksanakan sebanyak 2 Program dengan 18 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan pada Tahun 2025, yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 6 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Fasilitas Fraksi DPRD
 - b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan 5 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan 6 Sub Kegiatan, yaitu
- a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - f. Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - g. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan 7 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Pendalaman Tugas DPRD
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - d. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - e. Penyusunan Program Kerja DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c. Pelaksanaan Reses
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan 2 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan 1 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 8. Fasilitasi Tugas DPRD dengan 5 Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

BAB III

PENGUKURAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

3.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Sekretariat DPRD berisi kesepakatan antara Sekretaris DPRD dengan Bupati Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain:

Perjanjian Kinerja
Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretaris DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	69,25
2	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik	2,66 -2,75

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.276.259.933,-	APBD TA 2025
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 9.754.218.850,-	APBD TA 2025
	Jumlah Anggaran	Rp 41.030.478.783,-	

3.2 Indikator dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja dalam rencana aksi menggambarkan ukuran keberhasilan instansi secara keseluruhan. Indikator kinerja instansi harus selaras antar tingkatan unit

organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai. Setelah menetapkan indikator kinerja kemudian ditetapkan target kinerja yang harus dicapai.

Berikut merupakan indikator dan target kinerja pada Sekretariat DPRD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.1
Indikator dan Target Program Kegiatan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DPRD				
	Sasaran Strategis :	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	69,25
		Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,66-2,75
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	95 %
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	95 %
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	95 %
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	95 %
	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	9
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD"	Dokumen	1

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	Dokumen	57
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia dalam kondisi baik"	Dokumen	43
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	96
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Orang	46
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Dokumen	294
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	13
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	240
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Prasarana yang baik dan layak fungsi	Paket	29
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	26
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Laporan	1,532
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	1,400

			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	120
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit	122
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	95
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	27
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	Orang	120
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40
			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	Laporan	72
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12

		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	Persen	70 %
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Dokumen	24
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	9
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	9
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	2
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Dokumen	7
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1
		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Laporan	104
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	25
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	25
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan	Laporan	25

				Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	25
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	2
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	Dokumen	45
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	28
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Laporan	28
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Laporan	1
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1

		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	Dokumen	33
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	33
		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Dokumen	47
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	10

3.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran. Setelah dilaksanakan perhitungan maka didapatkan selisih kinerja. Terhadap selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, setiap triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 mengalami beberapa permasalahan diantaranya:

1. Terdapat perbedaan realisasi kinerja dan realisasi keuangan dikarenakan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan ada tahun 2024 tetapi belum terdapat realisasi keuangan.
2. Refocusing dan efisiensi anggaran berimbas pada keterbatasan pelaksanaan kegiatan.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal disebabkan adanya keterbatasan keuangan.

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Melihat kendala - kendala yang dihadapi pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran untuk tahun 2025 berusaha untuk membuat perencanaan kinerja agar pencapaian target untuk tahun 2025 dapat mendukung visi dan misi Kabupaten Pangandaran. Melihat adanya keterbatasan keuangan dan terdapatnya pelaksanaan kinerja yang tidak seimbang, maka Sekretariat DPRD melakukan beberapa langkah tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi atau konsultasi secara daring untuk menghemat kegiatan koordinasi dan konsultasi.
2. Melakukan penyesuaian rencana dan target pencapaian untuk tahun 2025 sesuai dengan adanya rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
3. Melakukan koordinasi untuk membuat perencanaan kinerja yang dapat dicapai untuk tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ini merupakan pedoman dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD. Dengan adanya pengukuran rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kinerja instansi dan diharapkan pegawai Sekretariat DPRD dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada akhir tahun kepada atasannya dan masyarakat.

Pengukuran rencana aksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Rencana Aksi ini dibuat dengan harapan agar kinerja yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Selain itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran agar pencapaian kinerja sesuai dengan target.

Parigi, 31 januari 2025
Sekretaris DPRD



Drs. HERI GUSTARI, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama, IV/c
NIP. 19680817 199301 1 001

							Penginputan Rancangan Awal Renja 2026 di SIPD	Data	5											
							Penyusunan Rancangan Renja 2026	Kertas Kerja Renja-rincian belanja		5										
							Penyusunan Rancangan Akhir Renja 2026	Kertas Kerja Renja 2026				5								
							Penginputan Rancangan Akhir di SIPD	Data				5	5	5						
							Penyusunan Dokumen Renja 2026	Dokumen Renja 2026							5					
							Penggandaan Dokumen Renja 2026	Arsip Dokumen Renja 2026							5					
			Jumlah Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Yang Tersusun		Dokumen	1	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	5										
							Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan 2025	Kertas Kerja Renja Perubahan 2025					5							
							Penginputan Rancangan Awal di SIPD	Data					5							
							Penyusunan Rancangan Renja Perubahan 2025	Kertas Kerja Perubahan Renja-rincian belanja					5							
							Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan	Kertas Kerja Perubahan Renja						5						
							Penginputan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2025 di SIPD	Data						5	5					
							Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2025	Dokumen Renja Perubahan 2025							5	5				

[illegible]

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"	Dokumen	1	330,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10														
										Melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan data/informasi perencanaan perangkat daerah dengan PPTK masing - masing bagian	Kertas kerja							15								
										Menyusun Rancangan Perubahan RKA 2025 Sekretariat DPRD untuk bahan rapat	Draft RKA							10	10							
										Melakukan Rapat Kerja Pembahasan Perubahan RKA 2025 dengan Komisi I dan Banggar	Draft RKA hasil Rapat dengan Komisi I dan Banggar							10	10							
										Menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2025 berdasarkan hasil Rapat Kerja	Data SIPD								30							
										Penetapan dan Penggandaan Dokumen RKA	Dokumen RKA								5							
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	"Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Dokumen	1	330,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	10														
										Melaksanakan koordinasi dan	Kertas kerja								15							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								hasil pelaksanaan kegiatan																	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	2	600,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen KAK	20														
									Mengumpulkan data Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									Membuat Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									Menyusun dan mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	96	300,133,200																		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25	36,252,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10														
									Inventarisasi pegawai yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan	Data		20													
									Menghitung biaya yang dibutuhkan dan mengajukan ke BP/BPP untuk kegiatan	Data							30								

								pendidikan dan pelatihan															
								Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kegiatan								30						
								Membuat dan menyusun laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai	Laporan								10						
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Orang	46	20,575,000	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK perencanaan	Dokumen	10												
								Inventarisasi kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan	Data				10				10						
								Inventarisasi peserta yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi	Data				10				10						
								Pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan					15			15						
								Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Laporan					10			10						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Menyusun Laporan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	Orang	120	19,730,355,044															
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	40	19,359,758,964															
								BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Mengidentifikasi perubahan dokumen kepegawaian		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									Membuat daftar gaji		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									Membuat SPP/SPM Gaji		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
									Membuat SI pembayaran gaji		2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	290,596,080				10											
								BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Menyusun KAK	Dokumen												
									Menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan	Dokumen				10								
									Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan	Kegiatan				70								
									Menyusun Laporan/ Dokumen Kontrak	Dokumen				10								
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40	80,000,000				10											
								BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Inventarisasi jumlah peserta medical check up	Data						10						

[illegible]

[illegible]

						1			Rapat Bapemperda dengan Komisi I s/d IV dan AKD lainnya (Penyampaian Judul Raperda yang diusulkan dalam Propemperda)	Risalah Rapat terkait Judul Raperda yang diusulkan Komisi I s/d IV dan AKD lainnya sebagai bahan Propemperda								10	10						
						1			Rapat Bapemperda dengan Bagian Hukum dan SKPD lainnya (Pelaksanaan Pengkajian penyusunan Propemperda)	Risalah Rapat terkait Rancangan Perda yang akan diusulkan sebagai Inisiatif DPRD dan Usulan Pemda dalam penyusunan Propemperda)									10	10					
						1			Koordinasi dan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat/ Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat/ Daerah Kabupaten/Kota lain (Menyiapkan DIM dan administrasi lainnya)										10						
						2			Paripurna Pengambilan keputusan dan Penetapan Propemperda Tahun 2025 (Usulan Raperda yang akan diusulkan sebagai Inisiatif DPRD dan Usulan Pemda, Pandangan Umum Fraksi)	Dokumen Keputusan dan Penetapan Propemperda Tahun 2025 (Keputusan DPRD dan Nota Kesepahaman)										10					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								AM Jawa Barat/ Daerah Kabupaten/Kota lain															
								Pelaksanaan Harmonisasi Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Risalah Rapat perjalanan dinas, Berita Acara Harmonisasi dan Naskah Akademik serta Raperda hasil Harmonisasi						5	5							
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Dokumen	7	1,283,480,800																
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	257,058,500	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen KAK	10												
									Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Hasil Rapat Bamus							10						
									Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi- fraksi dan jawaban Bupati tentang KUA dan PPAS)	Dokumen Risalah Rapat							10						
									Rapat Kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Risalah Rapat								10					
									Rapat kerja Badan Anggaran dengan komisi-	Dokumen Risalah Rapat								10					

								komisi terkait pembahasan KUA dan PPAS														
								Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Risalah Rapat							20						
								Koordinasi dan konsultasi terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Perjadin							10						
								Rapat konsultasi Badan Anggaran dengan pimpinan fraksi-fraksi terkait pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Risalah Rapat							10						
								Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 2 (penyampaian laporan banggar terkait pembahasan KUA dan PPAS, penandatanganan DK dan Nota Kesepakatan)	Laporan Hasil Pembahasan dan Nota Kesepakatan							10						
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	257,153,050	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KAK	10											
									Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Dokumen Hasil Rapat Bamus							10					

[illegible]

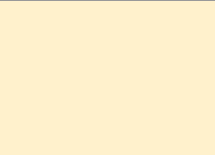
								Fraksi dan pimpinan komisi terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS																
								Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II (penyampaian laporan banggar, pengambilan keputusan dan penandatanganan SK dan Nota Kesepakatan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS)	Laporan Hasil Pembahasan dan Nota Kesepakatan									10						
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	260,062,400	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK pembahasan APBD	Dokumen KAK	5														
								Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal Pembahasan APBD	Dokumen Hasil Rapat Bamus									10						
								Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (Penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati)	Dokumen Risalah Rapat									10						
								Rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait pembahasan APBD	Dokumen Risalah Rapat									10						
								Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD	Dokumen Risalah Rapat									10						

[illegible]

			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	257,062,400	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK pembahasan perubahan APBD	Dokumen KAK	5												
									Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pembahasan perubahan APBD	Dokumen Hasil Rapat Bamus									10				
									Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I (penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati terkait Perubahan APBD)	Dokumen Risalah Rapat									10				
									Rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD terkait perubahan APBD Perubahan	Dokumen Risalah Rapat									10				
									Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD terkait perubahan APBD	Dokumen Risalah Rapat									10				
									Rapat kerja Badan Anggaran dengan pimpinan komisi dan pimpinan fraksi-fraksi terkait perubahan APBD	Dokumen Risalah Rapat									20				
									Koordinasi dan konsultasi terkait	Dokumen Risalah Rapat									10				

[illegible]

								pandangan umum fraksi-fraksi dan Jawaban Bupati terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)												
								Rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD terkait pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Risalah Rapat							10				
								Koordinasi dan Konsultasi terkait Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perjadin							20				
								Rapat Konsultasi Badan Anggaran dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi terkait pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Risalah Rapat							20				
								Rapat Paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran	Laporan Hasil Pembahasan SK dan Berita Acara							10				



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								koordinasi mengenai kebutuhan tim ahli	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
								pelaksanaan rapat kerja dengan tim ahli	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
								SPJ Honor Tim ahli	dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	210,000,000																
								BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	penyusunan KAK	dokumen	10												
									penyusunan draft SK TA Fraksi berdasarkan Surat Rekomendasi Fraksi	dokumen	30												
									pelaksanaan pembayaran belanja TA Fraksi	laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	28	217,590,000																
								BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Penyusunan KAK	Dokumen	10												
									Pelaksanaan kegiatan Rapat Penerimaan Audiensi	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5					
									Penyusunan laporan audiensi	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5					
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	4,225,000																
								BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	pelaksanaan Rapat Bamus penjadwalan pelaksanaan Paripurna Penetapan Renja DPRD	kegiatan										40			

[illegible]

								Sekretariat DPRD																		
								Verifikasi Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Mitra Bappeda		5	5															
								Verifikasi Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh SKPD		5	5															
								Penyelarasan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Rancangan Renja PD		5	5															
								Rapat Kerja Badan Anggaran terkait Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Hasil Rapat Bamus	5	5															
								Verifikasi Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh TAPD Perencana		5	5															
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1,346,622,000	BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN PENGANGGARAN	Menyusun KAK pelaksanaan Reses	Dokumen KAK	10																
								Rapat Bamus terkait penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan Reses	Dokumen Hasil Rapat Bamus	10				10				10								
								Pelaksanaan kegiatan reses	Dokumen SPJ	10				10				10								
								Rapat paripurna tentang penyampaian laporan kegiatan Reses	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses	10				10				10								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

